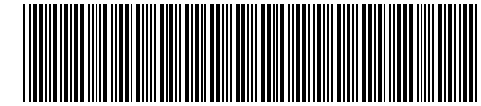




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.403429/2019**



DS:9325-4400-0284-0134

Revisi ke 02

Tanggal : 04 Juli 2019

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3. Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
4. Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
- Sebesar : Rp. 40.300.000 (EMPAT PULUH JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)
005.05.09.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

		Jumlah Uang
	Rp.	40.300.000
	Rp.	40.300.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 40.300.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 40.300.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9325-4400-0284-0134

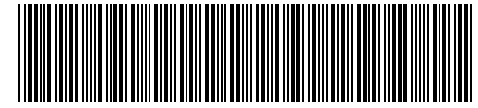
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kuasa Pengguna Anggaran : ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH
Bendahara Pengeluaran : MUHAMMAD AGUS, SE., M.Si
Pejabat Penanda Tangan SPM : MUHAMMAD ABDULLAH, A.Md

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			40.300.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			40.300.000
2 Program	005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)			40.300.000
Sasaran Program	01	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
Indikator Kinerja Program	01	Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang diselesaikan Tepat Waktu, Sidang keliling	3564	Perkara	
	02	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Tepat Waktu	2485	Perkara	
	03	Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	41	Perkara	
	04	Masyarakat Penerima Layanan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara	8640	Jam Layanan	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
Indikator Output Program	01	Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer Termasuk Penyelesaian Perkara Yang Kurang dari 5 (lima) bulan	3564	Perkara	
	02	Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	2485	Perkara	
	03	Perkara Yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	41	Perkara	
	04	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	8640	Jam Layanan	
Kegiatan	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			40.300.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN			
	02	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN			
	03	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara			
	04	Tenaga Teknis yang kompeten di Bidang Hukum dan Administrasi d Lingkungan Peradilan TUN			
Output Kegiatan	1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	9 Perkara		8.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	2485	Perkara	
Output Kegiatan	1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	1 Perkara		500.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Prodeo	41	Perkara	
Output Kegiatan	1059.003	Pos Bantuan Hukum	288 Jam Layanan		31.800.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN	8640	Jam Layanan	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2019
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9325-4400-0284-0134

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kuasa Pengguna Anggaran : ROMATUA LASMA SEMBIRING, SH
Bendahara Pengeluaran : MUHAMMAD AGUS, SE., M.Si
Pejabat Penanda Tangan SPM : MUHAMMAD ABDULLAH, A.Md

Halaman : IA.2

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

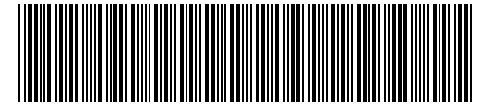
ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2019

I B. SUMBER DANA



DS:9325-4400-0284-0134

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

		Rp.		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	40.300.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	40.300.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2019
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9325-4400-0284-0134

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	-	40.300	-	-	-	40.300		
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	-	40.300	-	-	-	40.300		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	40.300	-	-	-	40.300		
1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	-	8.000	-	-	-	8.000	30 . 51	
01	RM	-	8.000	-	-	-	8.000	015	
1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	-	500	-	-	-	500	30 . 51	
01	RM	-	500	-	-	-	500	015	
1059.003	Pos Bantuan Hukum	-	31.800	-	-	-	31.800	30 . 51	
01	RM	-	31.800	-	-	-	31.800	015	
JUMLAH		-	40.300	-	-	-	40.300		

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9325-4400-0284-0134

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	7.200	3.392	2.900	2.900	2.900	2.900	6.000	6.000	6.108	40.300
		52 BELANJA BARANG	0	0	0	7.200	3.392	2.900	2.900	2.900	2.900	6.000	6.000	6.108	40.300
	005.05.09.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	0	0	7.200	3.392	2.900	2.900	2.900	2.900	6.000	6.000	6.108	40.300
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	7.200	3.392	2.900	2.900	2.900	2.900	6.000	6.000	6.108	40.300
		PERKIRAAN PENERIMAAN	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	114	1.500
		- PNPB (425232)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
		- PNPB (425233)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
		- PNPB (425239)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2019
IV A. B L O K I R**



DS:9325-4400-0284-0134

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : [30] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [403429] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2019
IV B. C A T A T A N**



DS:9325-4400-0284-0134

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : [30] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [403429] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
Dr. MULYONO, S.H., S.IP., M.H.